



**Laporan Kinerja Triwulan 3  
Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat selama triwulan 3 tahun 2025.

**A. Progress Capaian Kinerja**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
<b>[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan</b>				
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1,31	Persen	0,77	1,04
<b>[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat</b>				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Sangat Baik	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	A	Predikat	-	-

**B. Analisis Hasil Capaian Kinerja**

**[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan**  
**[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran**

**Progress/Kegiatan**

Kegiatan di Triwulan III yang mendukung meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, diantaranya:

**RO DCI.003**

1. Pelatihan Daring Calakan
2. Pojok Belajar dan Pojok Komunitas
3. Penyamaan Persepsi Pelatihan Guru BK
4. Pelatihan Fasilitator Daerah BK Hebat Prov. Jawa Barat
5. Pelatihan Menciptakan Transformasi Satuan Pendidikan melalui Kerjasama Sekolah dengan Keluarga
6. Pelatihan PM dan KKA (PNBP Fungsional)
7. Verval Berkas Ajuan PPG Bagi Guru Tertentu
8. Verval Berkas Persyaratan Pendaftaran PPG Bagi Guru Tertentu dan Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1 / D-4 Guru



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

9. Workshop Uji Keterbacaan Instrumen Dampak Pelatihan, Instrumen Dampak Non Pelatihan, dan Instrumen TNA
10. Workshop Validasi Instrumen Dampak Pelatihan, Instrumen Dampak Non Pelatihan, dan Instrumen TNA
11. Workshop Perancangan Program Microcredential

### **RO QDC.011**

1. TOT Calon Fasilitator Pelatihan PM Guru SLB
2. TOT Calon Fasilitator Pelatihan PM Guru SMA
3. TOT Calon Fasilitator Pelatihan PM Guru SMK
4. TOT Calon Fasilitator Pelatihan PM Pengawas
5. Karetasobat Nganjang ka Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Bogor

### **RO SCI.010**

Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah

### **Kendala/Permasalahan**

Kendala yang dihadapi pada Triwulan III untuk sasaran kinerja meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan diantaranya:

#### RO DCI

1. Penetapan data peserta program Pembelajaran Mendalam (PNBP Fungsional) dari dinas pendidikan yang dinamis (berubah-ubah) menyebabkan tarif RAB sulit ditetapkan
2. Rincian anggaran biaya (RAB) program Pembelajaran Mendalam (PM) sulit ditetapkan karena adanya perubahan data peserta, skema kegiatan dan jadwal pelaksanaan.
3. RAB tidak sesuai kebutuhan pembiayaan
4. Keterlambatan pembayaran biaya pelatihan PNBP Fungsional oleh sekolah
5. Terdapat peserta yang bermasalah saat diinput ke dalam LMS

#### RO QDC

1. Jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan pelatihan BCKS karena mengikuti kebijakan dari pusat
2. Wisma BBGTK Jawa Barat tidak dapat menampung peserta pelatihan BCKS, sehingga sebagian peserta diinapkan di hotel terdekat

#### RO SCI

Penetapan data peserta pelatihan BCKS dari dinas pendidikan yang dinamis

### **Strategi/Tindak Lanjut**

### **Strategi/Tindak Lanjut**

Strategi yang dilakukan untuk sasaran kinerja meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan diantaranya:

1. Melakukan tindak lanjut pendataan dengan koordinasi terus menerus dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan dan menetapkan data peserta.
2. Melakukan koordinasi terus menerus dengan Dinas Pendidikan dalam menyusun dan menyepakati RAB yang akan ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait pembayaran PNBP Fungsional



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Melakukan penyesuaian terhadap RAB/revisi RKA-KL

## **[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat**

### **[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik**

#### **Progress/Kegiatan**

Pada triwulan III, kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat internal terkait persiapan pembiayaan kegiatan yang melibatkan ketua tim keuangan dengan staf keuangan dan perencanaan;
2. Melakukan pelaporan data kontrak secara tepat waktu;
3. Melakukan pengelolaan Uang Persediaan minimal 1 kali per bulan;
4. Melakukan pengelolaan Uang Tambahan Persediaan (TUP) dan mempertanggungjawabkan secara tepat waktu;
5. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Wilayah Prov. Jawa Barat dan KPPN Bandung I terkait pelaksanaan anggaran Tahun 2025;
6. Menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara secara tepat waktu setiap bulan/ tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya;
7. Melakukan rapat internal Bagian Keuangan terkait pembahasan strategi penarikan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Koordinasi dengan BGTK DKI Jakarta terkait PNBPFungsional
9. Membuat Rekening Penampungan Lainnya untuk kegiatan PNBPFungsional

#### **Kendala/Permasalahan**

Kendala dan permasalahan yang dihadapi

1. Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga berimbas pada rencana deviasi halaman III DIPA;
2. Masih terdapat pagu anggaran yang di blokir sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran;
3. Proses penyusunan RAB program PM (PNBPFungsional) sulit ditetapkan karena adanya perubahan data peserta, jadwal, fasilitator.
4. Pengelolaan anggaran PNBPFungsional sangat rumit karena adanya kendala system dan banyaknya transaksi masuk yang disetorkan melalui virtual account dengan beragam jumlah atau nominal karena setiap jenjang dan kabupaten kota berbeda-beda.
5. Pembayaran dan pertanggungjawaban PNBPFungsional terkendala keterlambatan pembayaran PNBPFungsional dari satuan pendidikan penerima Boskin
6. Pembukuan transaksi keuangan PNBPFungsional melalui proses transaksi yang sangat rinci dan detail dikalikan jumlah kabupaten/kota, menyebabkan overload pekerjaan

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait pelaksanaan kegiatan prioritas
2. Melakukan rapat internal terkait strategi penyerapan anggaran.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait penetapan data dan pembayaran
4. Melakukan koordinasi dengan bank persepsi yang ditunjuk
5. Pengisi pembukuan program PM (PNBPFungsional) didelegasikan dari bendahara penerimaan kepada setiap penanggung jawab keuangan sesuai kabupaten/kota yang menjadi daerah tugas pembiayaannya masing-masing



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## **[SK 2] Meningkatkan tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat**

### **[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A**

#### **Progress/Kegiatan**

Kegiatan di Triwulan III yang mendukung indikator kinerja kegiatan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A diantaranya dengan melaksanakan:

1. Penyusunan Dokumen :
  - o Rencana Aksi, Capaian simproka
  - o Pengukuran Kinerja TW 1 dan 2
  - o Penyusunan Dokumen SKP
  - o Penyusunan Dokumen dan data dukung ZI-WBK
2. Penyusunan dan penandatanganan Kontrak Kerjasama dengan Satuan Pendidikan (PNBP Fungsional) Program Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding Kecerdasan Artificial (KKA)
3. Rapat Pelaksanaan ZI WBK
4. Peningkatan Kapasitas
  - o SDM Diklat Widyaiswara
  - o Baru Diklat Arsiparis
5. Assemen Pegawai

#### **Kendala/Permasalahan**

Kendala yang dihadapi pada indikator kinerja kegiatan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A adalah:

1. Terjadinya pergantian pimpinan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian terhadap Pejabat Perbendaharaan
2. Terdapat sasaran PNBP Fungsional sebanyak 21.062 orang dari jenjang dikdas dan dikmen di bawah koordinasi 27 Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan memerlukan tenaga SDM yang menangani pengelolaan kegiatan dengan baik
3. BBGTK Jawa Barat menjadi satker pengampu BGTK DKI Jakarta karena BGTK DKI Jakarta belum mempunyai Bendahara Penerimaan sehingga menampung PNBP Fungsional binaan BGTK DKI Jakarta yang menyebabkan overload pekerjaan Bendahara Penerimaan
4. Adanya perubahan komponen kegiatan yang ada di RKAKL (tahapan kegiatan, satuan biaya);
5. Sulit menetapkan penjadwalan karena mengikuti kebijakan pusat dan ketersediaan tempat/lokasi kegiatan (lokasi kegiatan di BBGTK Jawa Barat / satuan kerja terdekat)
6. Sulit menetapkan Rencana Penarikan Dana (Jadwal kegiatan Pelatihan BCKS di bulan Agustus ketika menetapkan RPD di awal triwulan 2, karena mengikuti kebijakan pusat/terlambat dilaksanakan)

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

Strategi yang dilakukan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja kegiatan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait SK Perbendaharaan dan mengusulkannya ke KPPN Bandung 1
2. Membagi SDM yang menangani program PM terkait dengan menugaskan PIC teknis, PIC Kemitraan dan PIC Keuangan di tiap kabupaten kota
3. Melakukan koordinasi intens dengan BGTK DKI Jakarta
4. Melakukan revisi RKA-KL (POK, DIPA);
5. Melakukan konfirmasi dan memastikan pada Tim Kerja/Penanggung Jawab agar menyusun ulang terkait strategi penjadwalan;



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

6. Melakukan revisi penyesuaian/pemutakhiran Rencana Penarikan Dana.

### C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7614.DCI.003] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	410	350	Rp21.294.868.000	Rp11.289.973.888	53.02
2	[DI.7614.QDC.011] Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	1410	900	Rp14.313.621.000	Rp10.325.776.786	72.14
3	[DI.7614.SCI.010] Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	450	0	Rp51.939.959.000	Rp2.869.245.386	5.52
4	[DI.7614.SCI.011] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	728	0	Rp7.338.761.000	Rp0	0.00
5	[WA.7619.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000	100.00
6	[WA.7619.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp97.696.000	Rp85.530.810	87.55
7	[WA.7619.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp47.460.586.000	Rp28.722.026.999	60.52
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp142.465.491.000</b>	<b>Rp53.312.553.869</b>	<b>37.42</b>

### D. Rekomendasi Pimpinan

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja di Triwulan III, perlu dilakukan beberapa hal untuk mendukung upaya tersebut, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan pusat terkait pengelolaan perbendaharaan dan dalam pelaksanaan program-prioritas agar kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan
2. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan melalui pendekatan terkait pendataan, pembiayaan dan pengelolaan program Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding Kecerdasan Artifisial (KKA) yang dilakukan melalui mekanisme PNPB Fungsional



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Melakukan reviu program dan penyesuaian terhadap komponen kegiatan dalam anggaran/RKA-KL dengan merevisi POK
4. Melakukan strategi pengelolaan anggaran khususnya terkait PNBFP Fungsional agar pelaksanaannya berjalan lancar
5. Melakukan monitoring anggaran sehingga terpantau adanya deviasi antara penyerapan dan rencana penarikan dana
6. Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan penjadwalan yang sudah disepakati bersama agar dapat meminimalisir deviasi hal 3 DIPA

Bandung, 7 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa  
Barat

Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE